

**KEBIJAKAN POLITIK REPUBLIK RAKYAT CHINA SEBAGAI
NEGARA PENGHASIL EMISI GAS TERBESAR DI DUNIA TAHUN 2011-
2016**

RISKI WANDESTA ZEN

Mahasiwa program S1 Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: riskiwandestazen@gmail.com

Abstrak:

Jurnal ini menjelaskan bagaimana kondisi emisi gas dunia dan kondisi emisi gas di China sebagai negara penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia. Dan juga menjelaskan pasal-pasal yang terdapat dalam Protokol Kyoto dan bagaimana mekanisme yang ada di dalam Protokol Kyoto. China merupakan negara penghasil emisi gas di dunia yang secara tidak langsung berkontribusi sangat besar dalam mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Tetapi China kurang kooperatif dalam mengurangi emisi gas negara mereka. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah faktor domestik yaitu kepentingan nasional China dalam sektor industri yang merupakan faktor pertumbuhan perekonomian China. Jurnal ini menganalisa faktor apa yang menyebabkan China tidak mematuhi Protokol Kyoto. Pemerintah China dalam menyikapi tuntutan dari dunia internasional menyatakan prinsip *Common But Differentiated Responsibilities*, yang berarti negara berkembang menurunkan emisi gas secara sukarela dan bukan kewajiban yang mengikat. China ingin melindungi kepentingan nasional mereka dalam sektor industri karena sektor industri merupakan faktor utama dalam pertumbuhan perekonomian China.

Kata Kunci: *Emisi gas, Protokol Kyoto, Republik Rakyat China*

PENDAHULUAN

Isu lingkungan dalam dunia hubungan internasional mulai berkembang sejak akhir tahun 1970-an. Sejak saat itu banyak diadakan pertemuan tingkat internasional guna membahas dan bekerja sama dalam menangani isu lingkungan.

Salah satu pertemuan tingkat internasional yang penting adalah Pertemuan Kyoto pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Dalam pertemuan ini menghasilkan

suatu protokol yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah suatu perjanjian internasional yang sah dimana negara-negara industri secara kolektif mengurangi emisi gas sebesar 5,2 persen yang dihasilkan negara mereka (Yuliantoro, 2015). Protokol Kyoto pertama kali diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997 dan dibuka untuk ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 16 Maret 1998.

Sejak Hu Jintao menjadi kepala Partai Komunis pada tahun 2002 dan Wen Jiabao menjadi Perdana Menteri, kepemimpinan China dibawa menuju ekonomi yang konsisten. Tetapi gagal dalam merealisasikan tujuan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan pengaman lingkungan. Banyak ahli dan beberapa negara mengatakan bahwa China tidak akan bisa selaras dengan lingkungan, dengan kata lain tanpa adanya perubahan politik tidak akan berhasil.

China sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 30 Agustus 2002. Dan pada tahun 2004 pemerintah China mengeluarkan kebijakan Green G.D.P untuk menghitung kerusakan lingkungan pertahun dan kesehatan manusia tiap-tiap provinsi.

Pada akhir tahun 2004 pemerintah mengeluarkan laporan pertama dari kebijakan Green G.D.P, diperkirakan biaya untuk memperbaiki polusi pada tahun 2004 adalah 3% dari GDP yang berarti polusi diatur pertumbuhannya sebesar 7% dari 10%. Kemudian sisa 3% polusi dibayar pemilik perusahaan kepada pemerintah China. Tetapi kebijakan ini dinilai tidak efektif dalam mengatasi masalah lingkungan. Karena perusahaan mempunyai modal yang besar akan berlomba-lomba untuk menaikkan produksi untuk membayar pajak (Irwansyah, 2013).

China adalah negara dengan luas wilayah yang luas (sekitar 9,5 juta km²), jumlah penduduk terbesar di dunia yakni lebih dari 1,3 miliar jiwa, ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, dan telah menjadi salah satu negara raksasa ekonomi dunia. China juga telah bertransformasi sebagai negara berkembang menjadi negara maju.

China telah berkontribusi sangat besar dalam perusakan lingkungan terutama dari emisi gas karbon yang dihasilkan negara tersebut. Pada tahun 2015 China telah menyumbang sekitar 28 persen dari total emisi gas dunia, diikuti dengan Amerika Serikat diperingkat kedua menyumbang emisi gas sebesar 16 persen dari total emisi gas dunia.

Hal ini membuat dunia internasional menuntut China agar berperan aktif dalam pengurangan emisi gas yang dihasilkan negara tersebut mengingat emisi

gas merupakan salah satu faktor yang mendorong pemanasan global. Dunia internasional juga berusaha mencapai kesepakatan dengan pemerintah China dalam mengatasi masalah ini dengan menyertakan perekonomian China.

RUMUSAN MASALAH

“Mengapa China sebagai negara industri pengasil emisi gas terbesar didunia tidak mematuhi Protokol Kyoto dalam mengatasi masalah isu lingkungan mengenai emisi gas?”

PEMBAHASAN

PRINSIP-PRINSIP PROTOKOL KYOTO

Terdapat delapan prinsip yang diatur dibawah Protokol kyoto, *pertama* Protokol Kyoto menjadi tanggungan pemerintah dan diatur dalam kesepakatan global yang dilindungi PBB, artinya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Protokol Kyoto menjadi tanggung jawab negara dan dilindungi dibawah PBB.

Kedua, sesuai dengan pembagian dua kelompok negara (*Annex I dan Non Annex I*), kelompok negara *Annex I* yang terdiri dari 38 negara industri maju di Eropa, Amerika Utara, Australia dan Jepang adalah negara-negara maju yang bertanggung jawab menurunkan emisi gas dan melaporkan emisi gas mereka tiap tahun. Kelompok negara *Non Annex I* yang terdiri dari 133 negara lainnya tidak mempunyai kewajiban menurunkan emisi gas, tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam *Clean Development Mechanism (CDM)*.

Ketiga, kelompok negara *Annex I* berdasarkan laporan emisi gas tahun 1990 harus mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2%. *Keempat*, terdapat enam emisi gas rumah kaca yang harus dikurangi, yaitu karbondioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksaflorida, HFC dan PCF.

Kelima, batas pengurangan emisi gas akan kadaluwarsa pada tahun 2013 dan akan dibuat kembali reduksi karbon yang baru. Jika kelompok negara *Annex I* tidak mencapai target pada tahun 2012, maka harus membayar denda 30% dari berat karbon target kelompok negara *Annex I*.

Keenam, kelompok negara *Annex I* dapat membeli kredit pengurangan emisi dari negara lain untuk mencapai batas emisi gasnya. Pembelian dapat dengan uang tunai maupun pendanaan proyek emisi gas buang dari negara *Non Annex I* melalui sistem CDM atau melalui program Joint Implementation (JI) sesama *Annex I* atau

juga dapat membeli langsung dari negara *Annex I* yang sudah berada dibawah target.

Ketujuh, hanya dewan eksekutif CDM yang berpusat di Bonn, Jerman yang dapat mengeluarkan akreditasi Certified Emission Reducations (CER) untuk proyek yang akan di perjualbelikan, sehingga tanpa persetujuan dewan eksekutif CDM proyek tidak dapat diperjualbelikan. *Kedelapan*, kelompok negara *Non Annex I* akan menerima kredit karbon yang dapat dijual pada kelompok *Annex I* jika mengimplementasikan proyek gas rumah kaca.

KONDISI EMISI GAS DUNIA DAN EMISI GAS CHINA

Sejak dilangsungkannya Revolusi Industri pada abad ke-18, lingkungan global menderita pencemaran udara yang berdampak besar pada sistem iklim dengan kondisi emisi gas global terus meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Ketika Revolusi Industri dimulai, konsentrasi CO₂ di atmosfer mencapai 290 *ppmv* (*part per million by volume*). Saat ini telah mencapai 350 *ppmv* dan jika hal ini terus berlanjut maka diperkirakan 100 tahun yang akan datang, konsentrasi gas CO₂ meningkat dua kali lipat menjadi 580 *ppmv* dari zaman pra industri.

Akibatnya, 100 tahun yang akan datang suhu rata-rata bumi meningkat 4,5°C yang berdampak terhadap makhluk hidup yang ada di bumi. Menurut para ilmuwan yang tergabung dalam IPCC (*Intergovernmental Panel On Climate Change*), suhu bumi naik antara 0,4-0,8°C sejak 1860 yang berakibat naiknya permukaan air laut antara 10-20 cm sejak 1990. Persentase 3 besar negara dengan emisi gas terbesar saat perumusan Protokol Kyoto adalah AS sebesar 36,1%, Rusia 17,4% dan Jepang 8,5%.

Menurut buletin gas rumah kaca tahunan *World Meteorological Organization* pada tahun 2015, percepatan peningkatan CO₂ dipengaruhi juga oleh peristiwa El Nino. Antara tahun 1990 dan 2015 radiasi efek pemanasan pada iklim global meningkat 37%. Karbon dioksida menyumbang 65% terhadap pemanasan global sedangkan Metana menyumbang sekitar 17% (*Organization, Globally Averaged CO₂ Levels Reach 400 parts per million in 2015, 2016*).

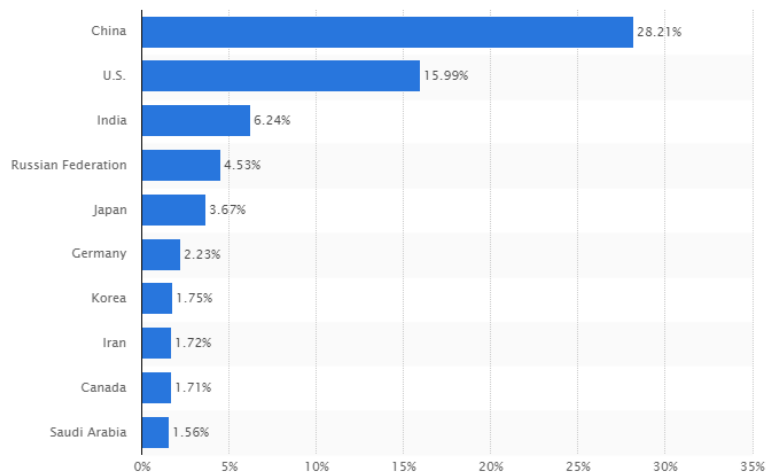


Diagram 1.1 Top ten negara penghasil emisi gas terbesar di dunia (Statista, 2016).

Diagram diatas merupakan data yang menunjukkan sepuluh negara penghasil emisi gas terbesar di dunia menurut Statista. Hingga saat ini China masih merupakan negara penghasil emisi gas terbesar di dunia. China menyumbang emisi gas karbon sekitar 28,21 persen dari total emis gas global.

Selanjutnya Amerika Serikat di peringkat kedua menyumbang emisi gas karbon sekitar 16 persen dari total emisi gas global. Meskipun sebelumnya Amerika Serikat adalah negara penghasil emisi gas terbesar dan mengalami penurunan dalam dekade terakhir menjadi peringkat kedua. Diikuti India 6,24%, Rusia 4,5%, Jepang 3,6%, Jerman 2,2%, Korea Selatan 1,7%, Iran 1,7%, Kanada 1,7%, dan Saudi Arabia 1,5%.

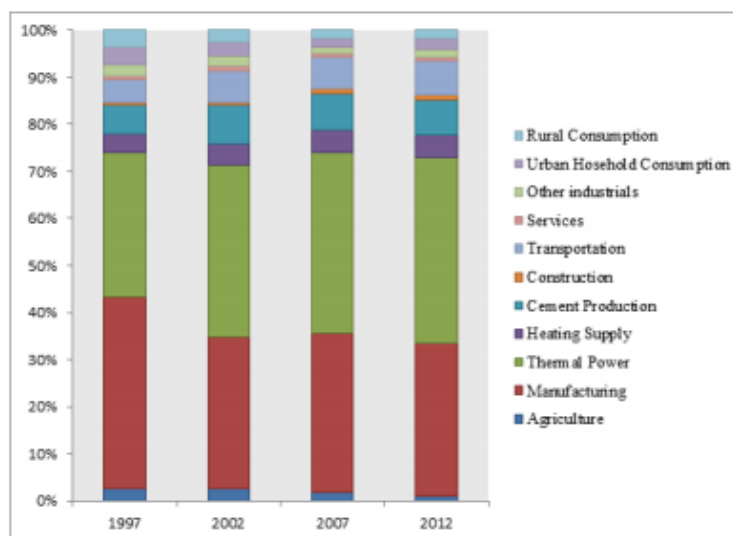


Diagram 2.3 sektor yang menghasilkan emisi gas di China (Liu, 2015, hal. 4).

China merupakan negara terbesar dalam populasi dan juga terbesar kedua dalam *Gross Domestic Product* (GDP) sehingga dalam penelitian emisi gas karbon negara tersebut digunakan indikator emisi gas karbon per kapita dan intensitas emisi karbon (emisi per unid GDP). Meskipun China merupakan negara dengan total penghasil emisi gas karbon global terbesar, tetapi emisi per kapita masih lebih rendah dibanding negara-negara industri lainnya.

Emisi gas per kapita tahunan negara-negara industri lain sudah berada pada titik memuncak dan menurun, sedangkan China emisi gas China per kapita terus meningkat. Sebagai perbandingan, emisi gas per kapita di China rata-rata 6,26t CO₂ per orang, sedangkan di AS rata-rata 17t CO₂ per orang dan Uni Eropa rata-rata 8t CO₂ per orang (Liu, 2015).

Pada tahun 2012 total emisi gas China hampir dua kali lipat emisi gas di AS, namun jumlah GDP China hanya 55% dari AS. Emisi gas karbon China jauh lebih besar dibandingkan perekonomian utama negara-negara lainnya seperti negara-negara G8. Pada tahun 2009 China mengumumkan kebijakan utama mereka untuk mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan mengurangi intensitas emisi gas karbon sebesar 45% pada tahun 2020 dengan perbandingan dengan emisi gas China pada tahun 2005.

ANALISIS KETIDAKPATUHAN CHINA TERHADAP PROTOKOL KYOTO

Protokol Kyoto merupakan suatu tatanan internasional yang sah khususnya negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto terutama China. China merupakan negara berkembang dan bukan negara penghasil emisi gas yang besar pada saat pembuatan serta ratifikasi Protokol Kyoto. Namun seiring pertumbuhan perekonomian China dengan sektor industri menggunakan batubara sebagai sumber energi utama, China telah menjadi negara penghasil emisi gas terbesar di dunia sejak 2011.

Hal ini otomatis menjadikan China memiliki tanggung jawab sebagai negara penghasil emisi gas terbesar didunia walaupun dalam Protokol Kyoto China merupakan anggota negara *Non Annex I* yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap penurunan emisi gas.

China memiliki kebutuhan untuk menunjukkan sikap sebagai masyarakat internasional sebagai bentuk *moral responsibility* terhadap permasalahan lingkungan, terutama adanya tekanan dari dunia internasional. Dunia internasional menuntut China untuk meningkatkan kontribusinya dan mengambil komitmen kuat dalam usaha-usaha penyelesaian masalah lingkungan hidup.

Faktor domestik juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri China dalam proses negosiasi masalah lingkungan. Dalam kasus China, kondisi domestik sangat berpengaruh dalam negosiasi kesepakatan internasional yang diikuti negara Tirai Bambu tersebut termasuk dalam UNFCCC.

Pemerintah China menyikapi tuntutan dunia internasional berdasarkan prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR). Prinsip tersebut memiliki arti bahwa negara berkembang menurunkan emisi gas secara sukarela, bukan sebagai kewajiban yang mengikat. Namun dalam COP ke 17, melalui negosiator pemerintah China Xie Zhenhua menerima kesepakatan dengan beberapa syarat dimana prinsip persamaan harus dijunjung tinggi yang berarti negara berkembang memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atas polusi dari negara maju.

China kehilangan kepercayaan pada efektivitas UNFCCC dan akan beralih ke solusi regional jika pada negosiasi di Paris atau COP21 tidak menemukan solusi. Negosiasi regional mungkin mengurangi utilitas dalam membentuk kebijakan perubahan iklim China. Namun, China telah semakin terbuka terhadap pemerintah asing yang berpengalaman dalam langkah-langkah penerapan kebijakan perubahan iklim.

Kebijakan mengenai perubahan iklim di China akan berjalan dan sulit diprediksi. Target dari kebijakan *12th Five Year Plan* China diperkirakan akan berjalan tanpa melalui kesulitan, namun diluar dari periode kebijakan tersebut akan membuat kemajuan yang nyata dan akan jauh lebih sulit.

Kebijakan *13th Five Year Plan* China yang sudah dalam tahap pengembangan mungkin tidak mengandung batasan karbon yang mengikat yang dicari oleh negara-negara maju. Paling tidak kebijakan ini akan menerapkan pembatasan konsumsi batubara dan energi yang mengikat.

China diperkirakan akan memperluas dan memperbaiki sistem perdagangan emisi, baik secara regional maupun nasional. Banyak komunitas pembuatan kebijakan China percaya bahwa pada tahun 2020 terdapat skema perdagangan emisi nasional dan juga pajak karbon.

Intensitas energi, karbon dan target energi non fosil cenderung akan terus berlanjut. Namun meningkat atau menurunnya akan bergantung pada seberapa mudah China mencapai target *12th Five Year Plan*. Perjalanan kebijakan perubahan iklim China baru saja dimulai dan diperkirakan China akan siap menerima batasan mutlak atas emisi dan membuat skema perdagangan emisi nasional dalam waktu lima hingga 10 tahun.

Kebijakan perubahan iklim di China didorong oleh prioritas domestik dan keamanan energi yang mencegah degradasi lingkungan lokal, rekonstruksi ekonomi dan citra di dunia internasional yang sebagian besar juga mengurangi emisi karbon.

Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah perekonomian China saat ini dengan besarnya pangsa batubara sebagai energi utama, karena China memiliki cadangan batubara jauh lebih besar dibanding minyak dan gas. Perekonomian China berkembang dengan pesat sejak China menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001. Meskipun nilai tambah dari total industri China dalam PDB turun dari 45% pada tahun 2001 menjadi 41% pada tahun 2015, tetapi industri manufaktur di PDB sekitar 30% (Olivier, Maenhout, Muntean, & Peters, 2016).

Dalam memahami kebijakan perubahan iklim China, poin utama tidak hanya memahami kepentingan dari aktor utama, tetapi juga seluruh aktor dalam pemerintahan yang terkait dengan kebijakan perubahan iklim. Prioritas utama pemerintahan China adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didasari untuk mengatasi kemiskinan, stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah (Williams, 2014). Kebijakan lingkungan di seluruh dunia secara teratur terbentur dengan pembangunan ekonomi, begitu juga dengan China.

Terutama permasalahan yang dihadapi China adalah untuk terus berusaha memperbaiki taraf hidup sekitar 157 juta warganya yang masih hidup kurang dari \$ 1,25 per hari. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah China menolak gagasan bahwa China harus bertindak dalam mengatasi masalah perubahan iklim dari kewajiban moral apapun terhadap negara lain, terutama karena secara historis negara-negara maju telah mengeluarkan emisi lebih besar dibandingkan China.

China adalah konsumen dan produsen energi terbesar didunia. Pemerintah China menyadari jika energi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan energi akan meningkat selama pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah China, permasalahan bukan hanya mengganti bahan bakar fosil dengan sumber yang lebih bersih, tetapi juga mendapatkan energi sebanyak mungkin dari kedua sumber energi tersebut.

Fakta bahwa kepentingan nasional China merupakan motivasi yang mendasari kebijakan perubahan iklim di China bukanlah hal yang baru. Kekhawatiran domestik akan selalu menjadi dasar China dalam posisi internasional mengenai perubahan iklim. Namun hubungan antara kepentingan

nasional dan kebijakan politik menunjukkan bahwa perubahan iklim dan energi menjadi prioritas utama dan semakin penting di masa depan.

Pola yang dianggap efektif untuk mempengaruhi kebijakan perubahan iklim adalah kerjasama antar negara mengenai tindakan praktis atau teknis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim di China. Dalam hal ini. Mengikat China dalam kebijakan yang spesifik melalui kesepakatan internasional seharusnya tidak dipandang sebagai satu-satunya cara dan bahkan yang paling efektif sekalipun untuk mempengaruhi kebijakan China terhadap iklim.

Konferensi yang baru-baru ini diadakan untuk membahas isu lingkungan yakni COP (Conference Of the Parties) ke-21, pada tahun 2015 di Paris. China sendiri tentu saja memiliki posisi yang sangat penting didalam COP21, karena pada tahun 2015 sendiri China adalah negara industri penyumbang emisi gas terbesar didunia.

Sementara, China tidak terikat dalam upaya pengurangan emisi karbon di bawah Protokol Kyoto karena China masih dianggap negara berkembang ketika kesepakatan ini dibuat pada 1997. Sebelumnya, China bersama dengan AS dan 23 pihak lainnya bersinergi membentuk kesepakatan politis sehingga banyak negara lain tak ingin berkomitmen kuat menjalankan Protokol Kyoto.

Dalam dokumen yang diajukan ke PBB, China menyatakan hasil dari negosiasi di Paris "harus memperhitungkan pembedaan tanggung jawab sejarah", karena menilai negara-negara maju saat ratifikasi Kyoto Protokol telah menempatkan lebih banyak karbon ke atmosfer ketimbang negara-negara berkembang.

KESIMPULAN

Didalam Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC yang disepakati di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan Protokol Kyoto sebagai tata cara penurunan emisi gas. China termasuk kedalam kelompok negara-negara berkembang yang tidak berkewajiban dalam penurunan emisi gas atau Non Annex I.

China merupakan negara dengan kegiatan industrialisasi yang sangat besar sebagai penyokong utama pertumbuhan perekonomian Negara Tirai Bambu tersebut. Dimulai sejak tahun 2003, China mengembangkan industri dengan cara mulai terbuka terhadap investasi asing dan kepemilikan modal sebesar 100 persen. Penjualan Negara Tirai Bambu tersebut bertambah 17 hingga 42,7 persen dari lima juta yuan sampai 4,104,5 miliar yuan dan menghasilkan keuntungan sebesar 815,2 miliar yuan.

Akibat dari kegiatan industrialisasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah China dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, China menjadi negara dengan penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia dan menggeser posisi Amerika Serikat. Berdasarkan data statistika pada tahun 2016, total emisi gas yang dihasilkan China mencapai 28,21 persen dari total emisi gas dunia, sedangkan Amerika Serikat 15,99 persen.

Emisi gas karbon ini tentu saja memberikan dampak buruk bagi bumi, seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini membuat dunia internasional menuntut China agar membuat kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pemanasan global, terutama China merupakan negara emitor terbesar. Dalam merespon tuntutan dari dunia internasional mengenai kerusakan lingkungan yang telah disebabkan oleh negara Tirai Bambu tersebut, China telah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini baik domestik maupun internasional.

Kebijakan utama perekonomian China yang terkait dengan emisi gas yaitu *China's Five Year Plans* bertujuan untuk mengurangi intensitas energi per unit produk domestik bruto atau PDB. Kebijakan *China's Five Year Plans* ke-12 yang diadopsi pemerintah China pada Maret 2011 berkonsentrasi pada energi dan perubahan iklim serta menetapkan target dan kebijakan untuk tahun 2011-2015.

Namun kebijakan *China's Five Year Plans* ke 12 ini merupakan target yang sesuai dengan status quo, dan juga merupakan langkah yang lebih dramatis untuk mengurangi konsumsi energi fosil, mempromosikan sumber energi rendah karbon dan merekonstruksi perekonomian China.

Kebijakan *China's Five Year Plans* ke 12 ini diprediksi akan membuat China menolak segala keputusan yang dibuat dalam COP setelah masa kebijakan ini selesai atau setelah tahun 2020. Sehingga dalam COP, China akan tetap kepada keputusannya dan akan menyetujui keputusan-keputusan yang akan dihasilkan dengan syarat tertentu.

Intensitas energi, karbon dan target energi non fosil cenderung akan terus berlanjut. Namun meningkat atau menurunnya akan bergantung pada seberapa mudah China mencapai target *12th Five Year Plan*. Terutama perekonomian China saat ini dengan besarnya pangsa batubara sebagai energi utama, karena China memiliki cadangan batubara jauh lebih besar dibanding minyak dan gas.

Kebutuhan domestik China dalam membangun pertumbuhan dan stabilitas perekonomian merupakan salah satu faktor yang membuat China kurang kooperatif terhadap komitmen dalam perjanjian internasional. China telah kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas UNFCCC dan China juga

berpendapat bahwa Protokol Kyoto seharusnya dibentuk untuk mengikat komitmen negara-negara maju dalam mengurangi emisi gas, karena China bertahan pada posisinya sebagai negara berkembang yang tidak terikat serta memiliki kewajiban dalam penurunan emisi gas.

Faktor kepentingan nasional China sebagai dasar pembuatan kebijakan perubahan iklim bukan merupakan hal yang baru. Kebutuhan dalam negeri akan selalu menjadi dasar Negara Tirai Bambu mengenai perubahan iklim dalam dunia internasional. Keinginan China untuk mengimpor gas alam terus meningkat dratis, sementara permintaan energi batubara tidak mungkin menurun dalam waktu pendek dan bahkan akan terus meningkat.

Kunci utama dalam memahami kebijakan perubahan iklim di China tidak hanya dilihat dari kepentingan aktor utama dalam hal ini negara, tetapi seluruh aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Prioritas utama pemerintah China saat ini adalah pertumbuhan ekonomi. Sehingga segala kebijakan yang terkait mengenai lingkungan akan terbentur dengan pembangunan ekonomi.

Pemerintah China dalam menyikapi tuntutan dari dunia internasional menyatakan prinsip *Common But Differentiated Responsibilities*, yang berarti negara berkembang menurunkan emisi gas secara sukarela dan bukan kewajiban yang mengikat. Prinsip tersebut juga disampaikan pemerintah China dalam konferensi yang baru-baru ini diadakan terkait menindaklanjuti permasalahan lingkungan terkait emisi gas guna menekan perubahan iklim dan pemanasan global adalah COP ke 21 yang diadakan di Paris pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). *Theories of International Regimes*. Massachusetts: The MIT Press.

Hallding, K., Han, G., & Olsson, M. (2009). *A Balancing Act: China's Role in Climate Change*. The Commission on Sustainable Development.

Hyndman, J. E. (1970/1971). "National Interest and the New Look". *International Journal*, Vol. 26, No. 1.

Krasner, S. D. (1982, Maret 25). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. Massachusetts: The MIT Press.

Murdiyarso, D. (2005). *CDM: Mekanisme pembangunan bersih*. Jakarta: Jakarta Buku Kompas.

Murdiyarso, D. (2003). *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi: Konvensi Perubahan Iklim*. Jakarta.

Nincic, M. (1999). "The National Interest and Its Interpretation" *The review of Politics*, Vol. 61, No. 1.

THE WORLD BANK. (2004). *CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM IN CHINA TAKING A PROACTIVE AND SUSTAINABLE APPROACH 2nd Edition*. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK.

JURNAL

Fadillah, L. L. (2014). UPAYA PEMERINTAH CHINA DALAM PENGURANGAN EMISI GAS BUANG DI BEIJING MELALUI CLEAN DEVELOPEMNT MECHANISM TAHUN 2005-2008 .

Lin, X., Cui, X., & Wang, M. (2017). Analysis of China's Carbon Emissions Base on Carbon Flow in Four Main Sectors: 2000–2013. *College of Management Science, Chengdu University of Technology*, 3.

Liu, Z. (2015). China's Carbon Emissions Report 2015. *Energy Technology Innovation Policy*.

Mardiatun. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA JEPANG DENGAN CHINA DALAM SKEMA CLEANDEVELOPMENT MECHANISMTAHUN 2008-2012.

Permana, R. (2009). Pengaruh Partai Republik Terhadap Penolakan Ratifikasi protokol Kyoto oleh AS pada UNFCCC Bali 2017. 21-22.

Swastika, B. A. (2015). UPAYA PEMERINTAH CHINA DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA MELALUI CDM (CLEAN DEVELOPMENTMECHANISM) SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO.

Williams, L. (2014). China's Climate Change Policies: Actor and Drivers. *Low Institute For International Policy*.

WEBSITE

Emissions Time Series. (2012). Dipetik April 10, 2017, dari edgar.jrc.ec.europa.eu: <http://edgar.jrc.ec.europa.eu/>

China, C. D. (2016, May 4). *Approval status of CDM projects in China*. Dipetik 5 2017, dari cdm-en.ccchina.gov.cn: <http://cdm-en.ccchina.gov.cn/>

Hieztyana, T. R. (2015, 6 22). *Kepentingan Nasional dalam Kajian Hubungan Internasional*. Dipetik 12 25, 2016, dari <http://www.ilmu-hi.com/>: <http://www.ilmu-hi.com/kepentingan-nasional-dalam-kajian-hubungan-internasional/#>

Irwansyah. (2013). *POLUSI CHINA MENGKHAWATIRKAN DUNIA*. Dipetik Maret 9, 2017, dari <https://www.academia.edu/>: https://www.academia.edu/13903952/polusi_udara_China_sangat_mengkhawatirkan_masyarakat

Irwansyah. (2013). *Polusi Udara China Sangat Menghawatirkan Masyarakat*. Dipetik Maret 10, 2017, dari Academia: http://www.academia.edu/13903952/polusi_udara_China_sangat_mengkhawatirkan_masyarakat

Lewis, J. (2011, March). *ENERGY AND CLIMATE GOALS OF CHINA'S 12TH FIVE-YEAR PLAN*. Diambil kembali dari Center For Climate and Energi Solutions: <https://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-goals-twelfth-five-year-plan>

- News, B. (2011, Desember 13). *Canada to withdraw from Kyoto Protocol*. Dipetik Desember 20, 2016, dari <http://www.bbc.com/>: <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-16151310>
- Olivier, J. G., Maenhout, G. J., Muntean, M., & Peters, J. A. (2016). *TRENDS IN GLOBAL CO2 EMISSIONS 2016 Report*. Netherlands: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency European Commission, Joint Research Centre (EC-JRC).
- Organization, W. M. (2011, 11 21). *Greenhouse gas concentrations continue climbing*. Dipetik 3 29, 2017, dari World Meteorological Organization: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/no-934-greenhouse-gas-concentrations-continue-climbing>
- Organization, W. M. (2016, 10 24). *Globally Averaged CO2 Levels Reach 400 parts per million in 2015*. Dipetik 3 2017, dari World Meteorological Organization: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/globally-averaged-co2-levels-reach-400-parts-million-2015>
- Prastika, L. E. (2015, May 28). *Negara-negara Asia Timur dalam Isu Lingkungan dan Pengananan Bencana Alam*. Dipetik May 2017, dari http://louis-embun-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-139091-MBP%20Asia%20Timur-Week%2011%20%20Negeranegara%20Asia%20Timur%20dalam%20Isu%20Lingkungan%20dan%20Pengananan%20Bencana%20Alam.html
- Program, I. I. (2013). *The Global Climate Change Regime*. International Institutions and Global Governance Program.
- Statista. (2016). *The largest producers of CO2 emissions worldwide in 2016, based on their share of global CO2 emissions*. Dipetik 4 2017, dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/>
- UNFCCC. (2014). *Status of Ratification of the Kyoto Protocol*. Dipetik Desember 20, 2016, dari <http://unfccc.int>: http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
- Yuliantoro, N. R. (2015). *Politik Internasional Analisis Inkonsistensi China dalam Masalah Lingkungan*. Dipetik Desember 20, 2016, dari Dokumen Kelompok 3: <http://rachmat.staff.ugm.ac.id/?s=politik+internasional&searchsubmit=U>

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul :

**KEBIJAKAN POLITIK REPUBLIK RAKYAT CHINA SEBAGAI
NEGARA PENGHASIL EMISI GAS TERBESAR DI DUNIA TAHUN 2011-
2016**

*People's Republic Of China Political Policy As The World's Largest Emitter
Country In 2011-2016*

RISKI WANDESTA ZEN

(20130510086)

Yang Disetujui

Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing